

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Tujuan utama pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang adalah untuk perbaikan kesejahteraan rakyat dan membebaskan rakyat dari ketertinggalan.<sup>1</sup> Pembangunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Pembangunan secara nasional melibatkan bantuan teknologi maupun tanpa bantuan teknologi. Pembangunan ekonomi jangka panjang suatu negara akan membawa perubahan mendasar pada struktur ekonomi negara tersebut, dari ekonomi tradisional yang berfokus pada sektor pertanian menjadi ekonomi modern yang berfokus pada sektor industri.<sup>2</sup>

Kebijakan pembangunan bertujuan untuk membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang di mana sektor industri akan didukung oleh sektor pertanian yang setara dan kuat dan akan direalisasikan secara bertahap.<sup>3</sup> Menurut pemikiran Chenery, teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada tahapan-tahapan perubahan ekonomi di negara berkembang dari pertanian tradisional ke sektor industri modern yang menjadi motor penggerak perekonomian.<sup>4</sup> Indonesia

---

<sup>1</sup> Irdam Ahmad dan Ilyas Saad, *Kajian Implementasi Kebijakan Trilogi Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: STEKPI, 2006), hlm. 1

<sup>2</sup> Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 61

<sup>3</sup> Bachtiar Rifai, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu Dan Teknologi*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 64

<sup>4</sup> Michael P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan)*, Diterjemahkan Oleh Drs Haris Munandar, MA Dan Puji AL, SE Dari Buku *Economic Development Ninth Edition*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 26

merupakan negara berkembang yang mengupayakan pembangunan ekonomi di bidang industri. Dalam konteks pembangunan nasional, sektor industri merupakan salah satu kunci proses pembangunan di bidang ekonomi dan saat ini mendapat perhatian pemerintah.<sup>5</sup>

Kegiatan di sektor industri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakatnya serta secara luas dapat meningkatkan perekonomian nasional. Dengan berkembangnya sektor industri di Indonesia akan membuat perekonomian nasional berkembang pesat dan menjadi lebih baik yang berakibat pada terjadinya perubahan struktur perekonomian nasional yang diharapkan dapat menghasilkan output yang terbaik dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena melalui proses industrialisasi ini tingkat pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan sehingga membuat masyarakat lebih sejahtera.

Perkembangan industri Indonesia telah beradaptasi dengan berbagai tahapan perkembangan ekonomi negara. Perkembangan industri pada awal pemerintahan Orde Baru adalah untuk mendukung pembangunan pertanian.<sup>6</sup> Selanjutnya arah umum kebijakan industri jangka panjang Indonesia ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dirumuskan tiap lima tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), badan pemegang kedaulatan tertinggi. Garis dasar pembangunan industri ditetapkan dalam GBHN tahun 1978, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang di mana

---

<sup>5</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1992), hlm. 353

<sup>6</sup> Irdam Ahmad dan Ilyas Saad, *Ibid.*, hlm. 30

industri yang kuat dan maju didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Untuk menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sektor industri harus dikembangkan dalam serangkaian tahapan, termasuk empat Repelita pertama, yaitu 1969/70 sampai 1988/89.<sup>7</sup>

Setelah berhasil melaksanakan pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan yang tertuang dalam tujuan Repelita I (1969-1974) kemudian pemerintah orde baru mulai beralih untuk pembangunan sektor industri. Berbagai macam pabrik dibangun pemerintah selain untuk mengolah hasil pertanian dan kehutanan sehingga memberikan nilai tambah pada pembangunan sektor industri yang secara bertahap telah berhasil membawa perubahan yang mendasar dalam perekonomian nasional.<sup>8</sup> Selama kurun waktu antara tahun 1965-1990 sektor industri di Indonesia mengalami kenaikan, tumbuh dengan laju rata-rata 12,0%, dan 12,7% selama kurun 1980-1989.<sup>9</sup>

Sektor industri memiliki keuntungan yang cukup tinggi jika dapat dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan sektor industri sangat bermacam-macam dari segi produksinya dan memberikan mutu dan manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Industri dapat menjadi penyokong bagi perekonomian suatu negara, sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan tentang industri. Akan tetapi kebijakan tersebut terkadang kurang disesuaikan dengan kondisi sosial

---

<sup>7</sup> Kian Wie Thee, *Industrialisasi Di Indonesia: Beberapa Kajian*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 20

<sup>8</sup> Lembaga Ketahanan Nasional, *Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 101

<sup>9</sup> World Bank, *World Development Report-The Challenge of Development*, ed, (Oxford University Press, 1991), hlm. 206

masyarakat setempat dan ketersediaan sumber daya serta teknologi pendukungnya.

Pasca perkembangan industri di Indonesia, kebutuhan lahan untuk pengembangan industri sendiri juga semakin meningkat. Lahan industri biasanya terletak di kawasan strategis untuk memudahkan dalam berbagai kegiatan industri. Oleh karena itu pemerintah dalam upaya mendorong peningkatan investasi di sektor industri diperlukan suatu penyediaan pembangunan kawasan industri yang tertata dan dapat menjadi pendorong kemajuan ekonomi di Indonesia, karena sektor industri ini memiliki peran strategis dan penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Penyediaan kawasan industri yang terstruktur dengan baik dan adanya fasilitas penunjang yang lengkap maka, kawasan industri dapat menarik minat dan mempermudah bagi investor untuk menanamkan modalnya membangun serta mengembangkan berbagai jenis pabrik dalam kawasan industri tersebut.

Kawasan industri menurut Roesanto W. Dirdjojuwono merupakan kawasan yang didominasi oleh kegiatan industri yang fasilitasnya meliputi pabrik industri, fasilitas penelitian dan pengembangan laboratorium, gedung perkantoran, bank, serta fasilitas sosial dan umum.<sup>10</sup> Istilah kawasan industri di Indonesia digunakan untuk mengungkapkan pengertian tentang konsentrasi sekelompok perusahaan industri dalam satu kawasan. Sedangkan menurut Marsudi Djodipuro, kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah

---

<sup>10</sup> Roestanto Wahidi Dirdjojuwono, *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan Dan Aplikasinya*, (Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2004), hlm. 2

seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.<sup>11</sup>

Menurut Keppres No. 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri, menyebutkan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.<sup>12</sup> Secara konseptual kawasan industri merupakan tempat kegiatan industri yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Program pembangunan kawasan industri di Indonesia dimulai pada tahun 1973 yaitu dengan berdirinya Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (JIEP). Kemudian tahun 1974 dibangun Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), selanjutnya dibangun Kawasan Industri Cilacap tahun 1974, menyusul Kawasan Industri Medan tahun 1975, Kawasan Industri Makasar tahun 1978, Kawasan Industri Cirebon tahun 1984, dan Kawasan Industri Lampung tahun 1986.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Marsudi Djojodipuro, *Teori Lokasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1992), hlm 48

<sup>12</sup> Berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1989 pasal ke-1

<sup>13</sup> Timoticin Kwanda, "Pengembangan Kawasan Industri Di Indonesia," *DIMENSI (Journal of Architecture and Built)* 28 No. 1 (2004): 54–61.

Oleh karena itu dalam pembangunan kawasan industri penulis menganggap bahwa dapat dengan mudah mengundang partisipasi sektor swasta, nasional maupun asing dalam menanamkan modalnya di sektor industri, dan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambahnya serta memperbaiki struktur perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan. Karena pada umumnya kegiatan industri di Indonesia merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena banyaknya tenaga kerja yang tidak dapat diatasi oleh sektor pertanian saja. Perindustrian di Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja dan bisnis.<sup>14</sup>

Berawal dari pesatnya kawasan industri, pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 53 tentang kebijakan kawasan industri. Deregulasi mengenai kawasan industri diatur dalam Keppres No. 53 Tahun 1989 di mana di dalamnya disebutkan bahwa tujuan pembangunan kawasan industri adalah mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.<sup>15</sup>

Dengan keberadaan kawasan industri yang lokasinya sangat strategis akan memudahkan dalam segala hal kegiatan perindustrian maka akan terjadi proses interaksi yang efisien dari laju pergerakan perekonomian di bidang industri. Di satu sisi, pada masyarakat Kabupaten Karawang, sektor industri akan berdampak positif bagi perkembangan masyarakatnya.

---

<sup>14</sup> Frans Husken, Mario Ruten, Jan Paul Dirkse, *Pembangunan Dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia Di Bawah Orde Baru*, (Jakarta: Grasindo, 1997), hlm. 91

<sup>15</sup> Berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 1989 pasal ke-2

Kabupaten Karawang merupakan daerah yang memiliki potensi lokasi dan daya dukung material yang cukup untuk pengembangan industri. Sebagaimana perkembangan industri di Pulau Jawa khususnya di Jawa Barat yang penulis anggap berdasarkan letak geografisnya yang strategis dan posisinya tidak terlalu jauh dengan Ibukota Jakarta dan tersedianya prasarana transportasi yang baik seperti akses jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Bandung melalui Karawang.

Pada tahun 1990, dikeluarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 593/SK.629-Bapp/1990 yang berisikan penetapan luas areal kawasan industri di Jawa Barat seluas 18.000 Ha. Luas sebaran kawasan industri tersebut yang diperuntukkan bagi 9 kabupaten sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Luas Sebaran Kawasan Industri di Jawa Barat<sup>16</sup>**

No.	Wilayah Kabupaten	Luas Areal
1.	Kabupaten Karawang	5.500 Ha
2.	Kabupaten Serang	3.500 Ha
3.	Kabupaten Tangerang	3.000 Ha
4.	Kabupaten Bekasi	3.000 Ha
5.	Kabupaten Purwakarta	1.000 Ha
6.	Kabupaten Bandung	600 Ha
7.	Kabupaten Bogor	500 Ha
8.	Kabupaten Cirebon	500 Ha
9.	Kabupaten Sumedang	400 Ha

Sumber: Agustinus Widanarto dalam Laporan Penelitian, Kesiapan Pemerintah Desa di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten DT II Karawang dalam Menanggapi Lonjakan Pendetang, (LIPI, 1994)

Berdasarkan data diatas, lahan peruntukan kawasan industri di Kabupaten Karawang adalah yang terluas di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini kemudian disebut Kawasan Industri Karawang Terpadu (KIKT). Oleh karena itu Kabupaten

<sup>16</sup>Agustinus Widanarto, *Kesiapan Pemerintah Desa Di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten DT II Karawang Dalam Menanggapi Lonjakan Pendetang*, (Jakarta: LIPI, 1994), hlm. 20

Karawang sangat potensial dan dipilih menjadi salah satu kawasan industri berikutnya dalam rangka menstabilkan kebijakan pemulihan perekonomian.

Salah satu dampak pada bidang industri yang sangat berpengaruh dalam masyarakat adalah adanya perubahan sistem ekonomi dari ekonomi substantif menjadi ekonomi pasar.<sup>17</sup> Selain itu, kegiatan perekonomian terutama pada sektor industri akan mendorong urbanisasi dan migrasi penduduk yang erat kaitannya dengan kesempatan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari segi sosial, sektor industri dapat mempengaruhi perubahan struktur sosial masyarakat, dari masyarakat desa menjadi masyarakat kota. Hal ini ditandai dari perubahan mata pencaharian dari bertani menjadi buruh pabrik.

Penulis mendapatkan suatu data yang memperlihatkan pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Karawang, yang semula masyarakatnya tergantung pada sektor pertanian telah bergeser menjadi pada sektor industri. Pada tahun 1983 peranan sektor pertanian sebesar 38,83%, sedangkan pada tahun 1997 perannya hanya 17,24%. Sebaliknya sektor industri dan perdagangan semakin besar dari 11,54% dan 21,86% tahun 1983 menjadi 32,09% dan 26,50% pada tahun 1997.<sup>18</sup> Alasan perubahan struktural ini adalah sektor industri lebih banyak menyerap tenaga kerja dan upah yang lebih besar daripada sektor pertanian. Lambatnya pertumbuhan sektor pertanian juga menjadi salah satu alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang memilih untuk mengembangkan sektor

---

<sup>17</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat Di Masa Depresi*, (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989), hlm. 2

<sup>18</sup> BPS, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Karawang 1993-1997* (Karawang: BPS Kabupaten Karawang, 1998), hlm. 22

industri, karena jika pemerintah hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai pendapatan daerah maka tidak akan berkembang.

Secara alamiah dan pertumbuhan penduduk akibat migrasi serta urbanisasi penduduk, dibutuhkan adanya peningkatan ketersediaan ruang atau lahan untuk kegiatan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur perkotaan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan berdampak nyata pada tata guna lahan dan struktur wilayah. Akibat munculnya pendatang, jumlah penduduk meningkat pesat, baik pekerja industri maupun peserta di sektor informal dan marjinal.<sup>19</sup> Perkembangan pada masyarakat di Kabupaten Karawang akan menimbulkan berbagai pengaruh atau perubahan. Perubahan yang terjadi terutama terkait dengan kegiatan masyarakat di tingkat makro, seperti transformasi kegiatan masyarakat dari bertani menjadi buruh pabrik atau transformasi tata ruang dan penggunaan lahan dari pertanian menjadi kawasan industri.

Berdasarkan data statistik yang diperoleh penulis, jumlah lahan pertanian di Kabupaten Karawang semakin berkurang. Pada tahun 1986, luas lahan pertanian mencapai 100.484 Ha<sup>2</sup> dan pada tahun berikutnya bertambah 124 Ha<sup>2</sup>, lalu 1988 berkurang 457 Ha<sup>2</sup>. Pengurangan lahan ini terus terjadi hingga pada tahun 1997, luas lahan pertanian hanya tersisa 93.904 Ha<sup>2</sup>.<sup>20</sup> Jadi, selama kurun waktu 10 tahun (1987-1997), terjadi penyempitan lahan seluas 6.704 Ha<sup>2</sup>.

---

<sup>19</sup> Dwi Ratna Nurhajarini, *Budaya Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Industri: Kasus Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Bupara Nugraha, 1998), hlm. 2

<sup>20</sup> BPS, *Karawang Dalam Angka 1997*, (Karawang: BPS Kabupaten Karawang, 1998).

Penyempitan lahan ini disebabkan oleh faktor peralihan lahan pertanian menjadi pemukiman dan areal kawasan industri.

Ketertarikan masyarakat Kabupaten Karawang pada kegiatan industri dapat dilihat dari peningkatan jumlah pekerja. Pada tahun 1989, jumlah lowongan kerja yang telah terisi menurut lapangan usaha industri hanya terdapat 51 dari 550 lowongan yang belum terisi.<sup>21</sup> Selama tiga tahun berikutnya peningkatan jumlah pekerja terus terjadi secara pesat, yaitu pada tahun 1992 di mana jumlah lowongan kerja yang telah terisi sebanyak 12.140 dari 15.383 lowongan kerja yang belum terisi.<sup>22</sup> Peningkatan ini terus terjadi hingga Kabupaten Karawang menjadi salah satu pusat pengembangan kawasan industri nasional terbesar di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini didasari oleh beberapa alasan yang dijadikan landasan bagi penulis untuk meneliti tema ini. Alasan pertama adalah yang sudah penulis jelaskan diawal bahwa “kebijakan pembangunan bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang, di mana suatu kemampuan sektor industri ditunjang oleh kemampuan sektor pertanian yang berimbang dan kokoh”. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini ialah sektor industri lebih terlihat dominan daripada sektor pertanian dengan banyak berdirinya pabrik-pabrik di luar wilayah kawasan industri yang awalnya ditetapkan di Karawang bagian selatan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan pertanian. Alasan kedua adalah Kabupaten Karawang tumbuh dan berkembang pesat dari faktor ekonomi sehingga membuat

---

<sup>21</sup> BPS, *Karawang Dalam Angka 1989*, (Karawang: BPS Kabupaten Karawang, 1990), hlm. 31

<sup>22</sup> BPS, *Karawang Dalam Angka 1992*, (Karawang: BPS Kabupaten Karawang, 1993), hlm. 36

pertumbuhan penduduk melalui arus migrasi penduduk yang mengakibatkan masyarakat asli Karawang tersisihkan dan jumlah angkatan kerja terus meningkat. Hal ini terlihat dari data statistik yang dibuat oleh BPS selama periode penulisan skripsi ini. Alasan ketiga adalah laju perkembangan industri yang terus berkembang, dibutuhkan sumber daya lahan yang cukup untuk keperluan kegiatan industri. Hal ini menyebabkan lahan pertanian di Kabupaten Karawang terus berkurang setiap tahunnya, padahal sebelumnya Kabupaten Karawang dikenal dengan sebutan lumbung padi Indonesia karena beberapa alasan, salah satunya adalah lahan pertaniannya yang sangat luas.

Sejauh pengetahuan penulis, telah banyak dibahas penulisan sejarah tentang industrialisasi khususnya di Kabupaten Karawang. Banyak penulisan yang membahas tentang perkembangan industri di Karawang. Beberapa contohnya antara lain: Maturidi Satar dalam tesis dari Universitas Indonesia (UI) yang berjudul *Pengaruh Industrialisasi Terhadap Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang)* yang membahas faktor-faktor yang menentukan dalam pengaturan ruang, seperti faktor sosial, ekonomi, dan lahan. Penelitian ini juga membahas persepsi masyarakat terhadap industrialisasi dan kesempatan kerja. Selain itu, juga terdapat skripsi yang membahas kebijakan Orde Baru mengenai industrialisasi dan pengaruhnya terhadap masyarakat petani di Kabupaten Karawang dalam penelitiannya yaitu skripsi karya Aniek Nurfitriani yang berjudul *Pengaruh Industrialisasi terhadap Kehidupan dan Sosial Masyarakat Petani Kabupaten Karawang (1989-1997)*.

Perbedaan karya-karya diatas dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada sudut pandang dan segi temporalnya. Pada skripsi ini penulis tidak hanya memaparkan kembali perkembangan kawasan dan kebijakan industri beserta dampaknya yang berakhir pada era Orde Baru saja, tetapi juga bagaimana perkembangan selanjutnya setelah Orde Baru runtuh terhadap kehidupan sosial ekonomi khususnya pada masyarakat di Kabupaten Karawang.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah perkembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 1989-2004. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan sejak kehadiran kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang yang telah diatur dalam kebijakan kawasan industri pada Zaman Orde Baru dan Zaman Reformasi. Dengan berfokus pada dampak adanya kawasan industri di tengah-tengah luasnya areal pertanian di Kabupaten Karawang yang berlokasi di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cikampek, Klari, dan Telukjambe (Karawang bagian selatan). Penulis juga berusaha memberikan gambaran bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Karawang khususnya kaum petani di sekitar kawasan industri dan juga masyarakat pendatang (kaum urban) dari sudut pandang sejarah sosial-ekonomi, serta perubahan struktur ekonomi Kabupaten Karawang.

Pembatasan perlu dilakukan supaya penelitian dapat lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar pada permasalahan-permasalahan lainnya. Dari segi spasial yang berkaitan dengan daerah atau tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah kawasan industri di Kabupaten Karawang dengan fokus pada Kecamatan Cikampek, Klari, dan Telukjambe. Dipilihnya Kabupaten Karawang karena kabupaten ini merupakan salah satu pusat pengembangan industri nasional, sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

Sedangkan dari segi temporal atau waktu berkaitan dengan pembatasan waktu yang dibuat, penelitian ini difokuskan pada periode 1989-2004. Tahun 1989 merupakan di mulainya waktu kebijakan kawasan industri yang telah dibuat yaitu, Keppres No. 53 Tahun 1989 yang setelah itu nantinya ada dua kali perubahan kebijakan industri selama jabatan pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun, 1993 dan 1996. Keppres No. 98 Tahun 1993 berfungsi sebagai penyempurnaan atas dasar Keppres No. 53 Tahun 1989 yang telah dibuat, sedangkan Keppres No. 41 Tahun 1996 dibuat sebagai mencabut keppres sebelumnya dan menggantikannya dengan peraturan baru. Lalu penelitian ini diakhiri pada tahun 2004, karena pada tahun tersebut pemerintah daerah sudah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004. Maka dari itu, pemerintah daerah mempunyai kesempatan menyediakan lokasi industri dengan adanya peraturan kebijakan

pengembangan kawasan industri Karawang yang tercantum dalam Perda Kabupaten Karawang No. 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang mewadahi kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan industri.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah sejarah perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang pada tahun 1989-2004. Karawang saat ini merupakan kota pengembangan industri terbesar yang ada di Indonesia. Sesuai dengan julukannya sebagai kota industri terpadu, banyak perusahaan di kota ini yang berdiri di atas lahan lumbung padi nasional. Dalam rumusan masalah ini, adapun permasalahan dan penelitian yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

- a) Apa usaha yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam menyikapi pesatnya pertumbuhan kawasan industri?
- b) Bagaimanakah perkembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang selama periode 1989-2004?
- c) Bagaimana dampak kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan adanya kawasan industri di Kabupaten Karawang 1989-2004?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan kawasan industri yang diterbitkan selama pemerintahan Orde Baru dan setelahnya serta juga dampaknya dalam bidang sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu juga untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang ditinjau dari sudut sejarah sosial ekonomi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun diharapkan kegunaan dari penelitian ini adalah dapat menjadikan masukan pada Pemerintah Daerah untuk kepentingan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Karawang dalam hal ini mengenai pengambil kebijakan didalam pelaksanaan yang mengatur tentang kawasan industri dan sebagai bahan evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari adanya kawasan industri bagi masyarakat setempat.

## **D. Metode dan Bahan Sumber**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil dalam bentuk

tulisan.<sup>23</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan model deskriptif-naratif yaitu, penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis dalam penelitian.<sup>24</sup>

Metode penelitian sejarah yang digunakan oleh sejarawan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum melalui 4 tahap yaitu: Heuristik (Pengumpulan Sumber), Verifikasi (Kritik), Interpretasi (Menafsirkan) dan yang terakhir adalah Historiografi (Penulisan).<sup>25</sup>

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan 4 tahap dalam penulisan yakni heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Metode tersebut adalah sebagai berikut.

a) Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah.<sup>26</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi kearsipan untuk memperoleh buku-buku, artikel, majalah, surat kabar, dan arsip yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Pada tahap pertama ini penulis

---

<sup>23</sup> Abdurrahman Dudung, "Metode Penelitian Sejarah," Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

<sup>24</sup> Sartono Kartodirdjo dan Sarwono Pusposaputro, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).

<sup>25</sup> Louis Gottschalk, "Mengerti Sejarah, Terj," Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

<sup>26</sup> Saefur Rochmat, *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 153

berhasil mengumpulkan sumber primer maupun sumber sekunder. Adapun sumber primer yang sudah didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Kebijakan Kawasan Industri
2. SK Gubernur Jawa Barat No. 593 yang berisikan penetapan luas areal kawasan industri di Jawa Barat
3. Keppres No. 98 Tahun 1993 berfungsi sebagai penyempurnaan atas dasar Keppres No. 53 Tahun 1989 yang telah dibuat
4. Keppres No. 41 Tahun 1996 Tentang Kebijakan Kawasan Industri yang baru dibuat sebagai mencabut keppres sebelumnya
5. Perda Kabupaten Karawang No. 19 Tahun 2004
6. Badan Pusat Statistik: Karawang Dalam Angka Tahun 1989-2004

Kemudian sumber sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku yang mendukung penelitian ini diantaranya adalah buku Rustian Kamaluddin dengan judul *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Pembangunan Daerah*; A. R Sehoed dengan judul *Manufacturing in Indonesia*, dalam *Bulletin of Indonesian Economics Studies*; Anne Booth dengan judul *Ledakan Harga Minyak Dan Dampaknya (Kebijakan dan Kinerja Ekonomi Indonesia Dalam Era Orde Baru)*; Thee Kian Wie dengan judul *Industrialisasi Di Indonesia (Beberapa Kajian)*; Donald W. Wilson dengan judul *Pembangunan Indonesia Menyongsong Era Lepas Landas*;

Hal Hill dengan judul *Investasi Asing Dan Industrialisasi Di Indonesia*; dan lain-lain.

Sedangkan kajian pustaka yang penulis gunakan didapat dari beberapa tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
2. Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang
3. Perpustakaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang
4. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia
5. Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta
6. Perpustakaan Universitas Singaperbangsa Karawang
7. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial
8. Ruang Baca Prodi Pendidikan Sejarah UNJ

b) Kritik Sumber

Setelah mendapatkan data-data yang relevan dengan tema, tahap kedua yang dilakukan yaitu kritik sumber. Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh fakta akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Tahap kritik dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern pada sumber, dilakukan agar dapat diperoleh keaslian sumber secara fisik. Sedangkan kritik intern bertujuan agar sumber yang digunakan dalam penelitian ini mengandung unsur kredibilitas dan dapat dipertanggung jawabkan validitas datanya.

Karena penulis lebih banyak menggunakan data statistik terbitan BPS, Perpustakaan Nasional, dan dokumen-dokumen Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk sumber primer dalam membuktikan keaslian sumber sehingga memudahkan penulis dalam menguji keautentikan sumber untuk proses kritik eksternal. Sedangkan, pada kritik intern yang dilakukan penulis adalah dengan membandingkan sumber yang terdapat dengan beberapa sumber lainnya pada kurun waktu tersebut. Selain itu, penelitian untuk membuktikan kredibilitas sumber (apakah sumber dapat dipercaya) dilakukan pula dengan menganalisis hubungan kasualitas antara peristiwa sebelum dan sesudah, apakah sesuai atau tidak. Setelah menggunakan kedua kritik tersebut, penulis mendapatkan fakta sejarah.

### c) Interpretasi

Sumber-sumber yang sudah dikritik baik ekstern maupun intern selanjutnya dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan dan setelah itu diterapkan sehingga memberikan satu kesatuan berupa bentuk peristiwa lampau. Sumber data yang menunjang pada penelitian ini adalah menggunakan dokumen tentang Keppres No. 52 Tahun 1989, beserta data-data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Dinas Perindustrian Kabupaten Karawang, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas Kependudukan serta arsip-arsip yang diperoleh dari Kantor Arsip Nasional maupun Kantor Arsip kabupaten Karawang sebagai acuan awal mula perkembangan kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Sedangkan untuk memperkuat analisis mengenai konsep kawasan industri serta dampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, akan digunakan sumber-sumber buku seperti karya Roesanto W. Dirdjojuwono dengan judul, *Kawasan Industri Indonesia: Sebuah Konsep Perencanaan dan Aplikasinya*; Thee Kian Wie dengan judul *Industrialisasi Di Indonesia (Beberapa Kajian)*; Hal Hill dengan judul *Investasi Asing Dan Industrialisasi Di Indonesia*; dan lain-lain.

Digunakan juga beberapa buku referensi utama sebagai salah satu penunjang penelitian, buku seperti karya Anne Booth dengan judul *Ledakan Harga Minyak Dan Dampaknya (Kebijakan dan Kinerja Ekonomi Indonesia Dalam Era Orde Baru)*; A. R Seohod dengan judul *Manufacturing in Indonesia*, dalam *Bulletin of Indonesiaan Economics Studies*; Thee Kian Wie dengan judul *Industrialisasi Di Indonesia (Beberapa Kajian)*; dan lain-lain.

Digunakan pula berbagai buku historiografi untuk menunjang penelitian ini seperti Dudung Abdurahman dengan judul *Metode Penelitian Sejarah*; Louis Gottschalk dengan judul *Mengerti Sejarah*.

#### d) Historiografi

Setelah melalui beberapa tahap, selanjutnya penyajian dalam bentuk tulisan dalam penulisan sejarah (Historiografi). Historiografi adalah rekonstruksi yang dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh untuk

merangkai sejarah.<sup>27</sup> Fakta-fakta yang diperoleh, kemudian disusun dan diseleksi dengan menggunakan penyajian deskriptif naratif yang banyak menguraikan kejadian tersebut dalam dimensi ruang dan waktu serta mengacu pada aspek tematis, sehingga bentuk tulisan penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan logis.

## 2. Sumber Penelitian

Bahan sumber yang dipergunakan untuk penulisan penelitian ini menggunakan sumber buku-buku, arsip, dokumen yang diterbitkan, artikel, koran dan majalah. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, Perpustakaan Daerah Kabupaten Karawang, Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia dan Perpustakaan Sejarah terkait lainnya tentang penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 69